Pertimbangan Strategis Jepang dalam Perang Dagang dengan Korea Selatan (2019–2023)

Rafiqah Adibah[1], Anita Afriani Sinulingga[2], Silvi Cory[3]

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: rfqadiba@gmail.com[1], nanisinulingga@gmail.com[2], silvicory.sc@gmail.com[3]

Abstract

Trade war between Japan and South Korea since 2019 highlights economic tensions triggered by historical and political issues as well as strategic interests in the technology sector. This conflict originated from the South Korean Supreme Court's decision demanding compensation from Japanese companies for forced labor practices during World War II. In response, Japan implemented export restrictions on semiconductor materials, impacting South Korea's technology industry. This study aims to analyze Japan's national interests in this trade war used the concept of national interest by Charles Chong-Han Wu. This study using a qualitative approach and a descriptive-analytical type of research. The findings indicate that Japan seeks to maintain its economic control through dominance in the semiconductor sector and secure its strategic position in the global market. Additionally, the export restrictions are seen as a measure to protect Japan's national security within the context of technological competition. In conclusion, this trade war reflects the fragile economic interdependence between the two countries and underscores the need for more stable diplomatic strategies.

Keywords: *Japan, National Interest, Semiconductor, South Korea, Trade War*

PENDAHULUAN

Latar belakang sejarah yang kompleks sering kali menjadi pemicu ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan, dua negara bertetangga di Asia Timur. Hubungan Jepang dan Korea Selatan telah lama diwarnai oleh ketegangan historis dan politik yang terus membekas hingga saat ini. Konflik ekonomi yang meletus pada tahun 2019 menjadi bukti terbaru dari dinamika kompleks kedua negara ini. Ketegangan dimulai setelah keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang menuntut perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi atas kerja paksa selama Perang Dunia II. Jepang merespon dengan memberlakukan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor yang sangat

penting bagi industri teknologi Korea Selatan, seperti Samsung dan SK Hynix (Mangkuto, 2019). Respon dari Jepang tersebut berdampak luas terhadap hubungan ekonomi kedua negara itu. Konflik ini mencerminkan bagaimana isu sejarah terus mempengaruhi hubungan bilateral hingga era modern (Asih & Masagung, 2019).

Kebijakan Jepang tersebut tidak hanya dilihat sebagai langkah ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan hukum Korea Selatan yang dianggap Jepang melanggar kesepakatan normalisasi hubungan bilateral pada tahun 1965. Kesepakatan tersebut, yang mencakup pemberian kompensasi ekonomi kepada Korea Selatan, dianggap oleh Jepang telah menyelesaikan semua klaim terkait kolonialisme masa lalu (Leba, 2019). Konflik ini memperburuk hubungan bilateral, yang sebelumnya telah tegang akibat isu-isu *comfort women* dan sengketa wilayah pulau Takeshima/Dokdo. Langkah Jepang tersebut memicu reaksi kuat dari masyarakat Korea Selatan yang kemudian menginisiasi boikot produk-produk Jepang (The Straits Times, 2023).

Boikot produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan dan penurunan wisata Korea ke Jepang adalah beberapa dampak sosial-ekonomi yang memperburuk situasi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan penjualan Jepang di Korea, tetapi juga mengungkapkan adanya ketergantungan industri kedua negara pada satu sama lain. Meski telah terjadi normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1965, peristiwa ini menunjukkan bagaimana luka sejarah tetap mempengaruhi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan (Lukluk Nurbaiti, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh latar belakang historis dalam konflik ekonomi kedua negara dengan fokus pada perang dagang 2019-2023. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dampaknya terhadap hubungan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang (CFI Team, 2023).

Untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana kepentingan Jepang dalam sengketa ini, artikel jurnal ini mengadopsi konsep kepentingan nasional dari Charles Chong Han-Wu. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap

kepentingan ekonomi Jepang dalam menjaga posisinya sebagai pemain kunci di pasar semi konduktor global. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi faktor penting, mengingat dominasi di sektor teknologi dianggap sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional Jepang dalam konteks persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji dampak perang dagang ini melalui studi pustaka dan analisis kebijakan. Hipotesis utama yang dapat ditarik adalah bahwa latar belakang historis, termasuk isu kerja paksa dan kolonialisme, memainkan peran signifikan dalam memicu konflik ekonomi Jepang dan Korea Selatan. Faktor tersebut mempengaruhi kebijakan proteksionisme Jepang yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi pasar global sembari merespons tuntutan sejarah yang terus diangkat oleh Korea Selatan.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada kekayaan narasi dan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks secara lebih terperinci dan holistic, dengan fokus pada konteks dan interpretasi data. Untuk mencapai hasil penelitian yang komprehensif dan matang, pendekatan deskriptif analitis diterapkan dalam seluruh tahapan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara terstruktur sekaligus memberikan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Untuk mengumpulkan data yang relevan, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan salah satu metode pengumpulan data sekunder. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber terpercaya yang telah ada sebelumnya, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga atau institusi, berita yang diterbitkan oleh media kredibel seperti CNN, serta dokumen lainnya yang relevan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, penelitian dapat didasarkan pada data

yang sudah diverifikasi, sehingga hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi penulis untuk mengakses beragam perspektif dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis topik penelitian.

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan sebuah perspektif untuk menjadi alat ukur dalam menganalisis persoalan yang akan diteliti. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah sebuah konsep yang diadopsi dari Charles Chong Han-Wu yaitu konsep kepentingan nasional (*national interest*). menurut Wu dalam mengklasifikasikan kepentingan nasional dari sebuah negara, ada tiga indikator utama dengan tiga sub komponen juga, kepentingan keamanan (*alliance*, *national capabilities*, dan *nuclear weapons possession*), kepentingan komunitas (*IGO*, *domestic development*, dan *democracy*), dan kepentingan ekonomi (*international trade*, *market openness*, FDI) (Wu, 2017). Tentunya setiap negara juga akan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Sesuai dengan konsep tersebut kepentingan Jepang dalam perang dagang Jepang-Korea Selatan tahun 2019-2023 akan di analisis dengan berdasarkan indikator kepentingan dan sub-komponen dari Wu.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tiga artikel jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai acuan utama dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Lisbet, berjudul *Ketegangan Hubungan Jepang-Korea Selatan dan Implikasinya* (Lisbet, 2019). Artikel jurnal ini membahas mengenai bagaimana dan kapan ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan itu berlangsung. Dalam artikel jurnal ini juga membahas ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia terkhusus investasi dan ekspor. Artikel ini membantu peneliti dalam memahami bahwa perang dagang yang terjadi antara dua negara tersebut dapat dirasakan juga oleh negara lain yang berbeda kawasan. Perbedaan artikel jurnal Lisbet dengan penelitian ini adalah

artikel ini lebih banyak menjelaskan implikasi dari ketegangan Jepang dan Korea Selatan terhadap kawasan Asia khususnya Indonesia. Sedangkan, penelitian ini lebih membahas mengenai kepentingan Jepang dalam perang dagang tersebut.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul *The Role of Historical Memory in Japan-South Korea Relation* oleh Condruta Sintionean (Sintionean, 2020). Artikel jurnal ini menjelaskan terkait kerja paksa yang menyebabkan konflik sejarah yang sering terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa ada tujuh perusahaan asal Jepang yang dituntut oleh masyarakat Korea seperti perusahaan Mitsubishi Heavy Industries, Nippon Steel dan sebagainya. Artikel jurnal ini juga menyebutkan bahwa sebenarnya terjadinya hubungan yang kian memburuk antara Jepang dan Korea Selatan berasal dari adanya ketidakmampuan kedua negara tersebut dalam menemukan titik temu mengenai isu-isu sejarah, apalagi dalam masa perang dulunya, yang kemudian berdampak serius terhadap masalah keamanan dan perdagangan. Artikel jurnal ini membantu peneliti memahami bahwa persoalan sejarah menjadi faktor utama pergejolakkan hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah terkait penjelasan persoalan sejarah yang membentuk hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan semakin memburuk.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul *Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan* oleh Lukluk Nurbaiti (Nurbaiti, 2021). Artikel jurnal ini mendeskripsikan berbagai faktor yang memengaruhi Jepang membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan, juga mencantumkan mengenai kebijakan Jepang terkait pembatasan ekspor semikondukor yang dicanangkan oleh kementrian ekonomi, perdagangan dan industri Jepang. Kontribusi artikel jurnal ini membantu peneliti memahami lebih lanjut terkait kronologi perang dagang Jepang dan Korea Selatan yang juga diakibatkan oleh pemberlakuan pembatasan semikonduktor yang dilakukan oleh Jepang dan membantu peneliti melihat bagaimana kebijakan pembatasan tersebut juga diakibatkan karena adanya persoalan sejarah yang kelam antara

kedua negara di masa lalu saat kependudukan Jepang di Semenanjung Korea. Artikel jurnal ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti dalam segi dasar konseptual yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Perang Dagang Jepang dan Korea Selatan (2019– 2023)

Sebelum membahas lebih jauh mengenai awal mula perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan, penulis akan lebih dulu membahas mengenai definisi perang dagang. Perang dagang adalah suatu konflik ekonomi yang terjadi antara dua negara atau lebih, dengan menerapkan kebijakan proteksionisme dalam bentuk hambatan perdagangan, dapat berupa pembatasan kuota impor atau memberlakukan tarif. Secara jangka pendek hambatan perdagangan ini dapat melindungi industri atau pasar. Namun, jika terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka hambatan perdagangan ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian (Anggraeni, 2019).

Eskalasi memburuknya dinamika antara Jepang dan Korea Selatan kembali memanas di akhir tahun 2018. Hal tersebut sebenarnya berakar dari permasalahan sejarah saat Perang Dunia II, saat dimana Jepang mengkolonialisasi Korea pada tahun 1910 sampai tahun 1945. Saat itu Mahkamah Agung Korea Selatan menuntut Jepang untuk memberikan kompensasi ganti rugi terhadap kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. para pekerja paksa tersebut dipekerjakan di perusahaan- perusahaan Jepang, seperti Nippon Steel, Sumitomo Metal, dan Mitsubishi Heavy. Pada Perang Dunia II ketiga perusahaan Jepang tersebut menjadi pemasok dalam bahan pembuatan pesawat terbang dan kapal Jepang tahun 1944 (Mangkuto, 2019). Sayangnya, Jepang menolak membayarkan US$88 ribu sebagai kompensasi ganti rugi, dan berujung pada penyitaan hak paten untuk perusahaan-perusahaan Jepang tersebut karena Jepang menganggap hal tersebut sudah diselesaikan berdasarkan pada perjanjian 1965 (Sebayang, 2019). Tindakan Korea Selatan tersebut membuat Jepang gusar dan mengancam interaksi Jepang dan Korea Selatan akan kian memburuk, padahal sebelumnya kedua negara tersebut telah melakukan penandatanganan

perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 1965. Hal tersebut pun menjadi katalisator dalam eskalasi memburuknya hubungan Jepang dan Korea Selatan.

Pada tahun 2019, Jepang sebagai negara importir terbesar bagi Korea Selatan, mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor ke Korea Selatan, yang diumumkan pada tanggal 1 Juli dan dikeluarkan per tanggal 4 Juli 2019, untuk bahan baku semikonduktor. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut didasarkan pada UU Devisa dan Perdagangan Luar Negeri yang terdapat pada pasal 25 (1) dan juga pasal 48 (1) (MOFA Japan, 2024). UU ini membahas dua hal, yakni:

1. Adanya perubahan dalam aturan pengontrolan perdagangan ekspor ke Korea.
2. Peralihan lisensi bagi tiga produk bahan baku semikonduktor yang di ekspor seperti *Photoresist*, *Fluorinated Polymide*, dan *Hydrogen Flouride*, dari lisensi masal menjadi lisensi ekspor individu.

Secara umum kebijakan tersebut mengatur ekspor bahan baku semikonduktor ke atau berasal Korea Selatan dengan menerapkan pembaruan aturan izin. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut membuat para pihak eksportir Korea Selatan diharuskan untuk memiliki persetujuan izin dalam transaksi pengiriman bahan baku semikonduktor yang memakan waktu proses selama 90 hari lamanya dari pihak yang memiliki otoritas dalam hal tersebut. Tentu saja hal tersebut merugikan Korea Selatan (Asih & Suksmonohadi, 2019). Sehingga, kebijakan dalam kontrol ekspor ini berdampak besar bagi dinamika bisnis negara Jepang dan Korea Selatan. Akibatnya juga kedua negara tersebut berujung mengeluarkan masing-masing negara dari daftar mitra dagang favorit atau *whitelist* perdagangan.

Kebijakan restriksi tersebut berdampak cukup besar bagi stabilitas *supply chain* industri elektronik dari Korea Selatan. Dengan begitu berakibat pada produksi komponen mikroprosesor, sirukuit terintegrasi, dan chip memori yang menurun. Sehingga permintaan pasar terkait bahan baku tersebut tidak dapat terpenuhi, serta ekspor barang-barang elektronik dari Korea Selatan menjadi terhambat. Dampak buruk tersebut tidak hanya dalam segi industri elektronik Korea Selatan saja, namun juga, mengikut sertakan pandangan buruk masyarakat

Korea Selatan kepada Jepang. Sebenarnya kerugian akibat restriksi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Korea Selatan saja, namun Jepang juga merasakan dampak yang sama, akibat mengalami pemboikotan oleh masyarakat Korea Selatan melalui gerakan demonstrasi sosial, *Boycott Japan*. Pada aksi demonstrasi tersebut masyarakat Korea Selatan yang ikut bergerak dalam aksi, menyuarakan kepada seluruh masyarakat Korea Selatan agar memboikot seluruh produk impor yang berasal dari Jepang, maupun produk dari perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Korea Selatan.



Gambar 1. Poster Slogan Boycott Japan

Kebijakan Jepang untuk memberlakukan restriksi ekspor terhadap Korea Selatan ini pun turut memengaruhi dinamika kerja sama keamanan di antara keduanya. Korea Selatan yang diwakilkan oleh Dewan Keamanan Nasional, pada 22 Agustus memutuskan untuk membatalkan pakta kesepakatan dalam kerjasama berbagi intelijen dengan negara Jepang. kesepakatan tersebut dikenal dengan GSOMIA (*General Security of Military Information Agreement*) atau Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer. GSOMIA merupakan kesepakatan yang memfasilitasi tentang pembagian penjelasan dan informasi mengenai ancaman keamanan seperti nuklir dan rudal Korea Utara. Perjanjian tersebut disepakati oleh Jepang dan Korea Selatan pada tanggal 23 November 2016, dan akan otomatis diperpanjang apabila salah satu pihak tidak ada yang membatlkan perjanjian kerjasama tersebut (Mangkuto, 2019).

Implikasi Perang Dagang dengan Korea Selatan bagi Jepang

Berlangsungnya Perang Dagang membawa pengaruh besar bagi kedua negara, tidak terkecuali untuk Jepang sendiri sebagai pihak pertama yang

memulai Perang Dagang, dengan mengeluarkan kebijakan restriksi ekspor terhadap Korea Selatan. Terdapat tiga pengaruh utama yang dialami Jepang akibat adanya Perang Dagang ini, yakni pengaruh ekonomi berupa penurunan nilai perdagangan dan penurunan tingkat investasi, pengaruh sosial dalam hal ketenagakerjaan dan kenaikan harga konsumen, serta pengaruh terhadap stabilitas politik Jepang.

Aksi boikot Jepang oleh masyarakat Korea Selatan memberikan dampak yang buruk terhadap penjualan berbagai produk konsumen dari Jepang di Korea Selatan. Berdasarkan data dari *Korea Custome Service* pada tahun 2020, terdapat lebih dari 30% jumlah impor produk dari negara Jepang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (Lee Dong-Hyun & Park Sung-Woo, 2019). Produk konsumsi seperti bir yang mengalami penurunan penjualan sekitar 21% hingga 24%, produk pakai seperti pakaian, alat rumah tangga, dan mobil juga menghadapi kemerosotan dalam penjualannya. Penjualan mobil merek *Toyota* telah turun sebanyak 32%, sedangkan untuk penjualan mobil merek *Honda* telah mengalami penurunan penjualan sebanyak 34%, dan merk *Lexus* sebagai merk top 3 yang diimpor di Korea Selatan juga mengalami penurunan sebanyak 25% berdasarkan data dari *Korea Automobile Importers & Distributors Association* (KAIDA) (Mangkuto, 2019).

Selain itu, produk jasa yang berasal dari Jepang pun tidak luput imbas negatif Perang Dagang, terutama untuk jasa travel, telekomunikasi, dan perbankan. Dalam sektor jasa dampak yang dihasilkan akibat boikot ini adalah berkurangnya jumlah wisatawan Korea Selatan ke Jepang senilai 10% yang berpotensi merugikan Jepang senilai USD500 juta lebih. Berdasarkan data survei dari *Korea Herald* pada bulan juli 2019, tepatnya dalam dua minggu pertama bulan tersebut pesanan perjalanan wisata dari Korea Selatan ke Jepang mengalami penurunan sebesar 50% hingga 70%, yang menyebabkan pendapatan Jepang menurun, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 (Asih dan Suksmonohadi, 2019). Secara keseluruhan, hal tersebut menyebabkan

penurunan ekspor dari Jepang ke negara Korea Selatan sekitar JYP46,6 miliar lebih hanya dalam kurun setahun (Lee Dong-Hyun & Park Sung-Woo, 2019).

Pengaruh dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan dalam seruan *Boycott Japan* memberikan dampak buruk bagi peluang investasi negara Jepang yang berada di Korea Selatan, maupun bagi minat investasi negara lain terhadap Jepang. Sosialisasi dari gerakan pemboikotan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Korea Selatan dengan sangat mudah. Berbagai produk impor dari Jepang mengalami penurunan drastis, dan membuat beberapa perusahaan asal Jepang yang terkena imbas boikot menjadi rugi. Hal tersebut mempengaruhi profitabilitas perusahaan Jepang, yang pada akhirnya turut berdampak pada arus FDI global ke Jepang. Pembatasan ekspor Jepang dalam bahan baku semikonduktor untuk industri semikonduktor Korea Selatan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat menurunkan minat dalam tingkat investasi asing langsung (FDI) ke Jepang. Investor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana mereka ke Jepang, mengingat risiko ekonomi yang meningkat.

Dalam hal ketenagakerjaan, perang dagang yang memicu penurunan produksi dan ekspor memberikan pukulan yang cukup besar pada aspek ketenagakerjaan di Jepang. Sektor-sektor seperti manufaktur dan teknologi, yang paling terpengaruh, menjadi harus mengurangi tenaga kerja untuk menyesuaikan diri dengan penurunan permintaan, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Peningkatan pengangguran ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan kemiskinan, tetapi juga menambah masalah kesehatan mental masyarakat. Secara ekonomi, pengangguran mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi domestik, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Gangguan rantai pasok dan kenaikan tarif impor juga memicu inflasi harga barang konsumsi, memperburuk daya beli, dan menghambat pemulihan ekonomi. Penurunan konsumsi ini berdampak langsung pada sektor ritel, manufaktur, dan jasa, yang berisiko menghadapi penurunan pendapatan, pengurangan tenaga kerja, dan penurunan investasi.

Pertimbangan Strategis Jepang dalam Perang Dagang Jepang dan Korea Selatan Tahun 2019–2023

Pada permasalahan ini, ditemukan indikasi bahwasanya Jepang telah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor tiga bahan baku semikonduktor utama—*hydrogen fluoride, fluorinated polyimide,* dan *photoresist*—khusus terhadap Korea Selatan. Kebijakan ini memicu berlangsungnya Perang Dagang antara dirinya dengan Korea Selatan pada 2019–2023, yang ditandai oleh boikot besar-besaran masyarakat Korea Selatan terhadap produk Jepang, seperti otomotif dan barang konsumsi. Akibatnya, ekspor Jepang ke Korea Selatan turun signifikan hingga mencapai JYP 46,6 miliar dalam waktu satu tahun, ini turut berdampak negatif pada penurunan PDB Jepang. Keputusan Jepang untuk memberlakukan restriksi ekspor terhadap Korea Selatan menjadi boomerang bagi perekonomiannya sendiri, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara ini. Meskipun mengalami kerugian yang cukup besar, namun Jepang tetap mempertahankan kebijakan ini. Hal tersebut tidak serta-merta membuat Pemerintah Jepang segera membatalkan kebijakan pembatasan ekspor tersebut. Penelitian ini akan mengulas hal yang menjadi kepentingan Jepang dalam perang dagang tersebut dengan menggunakan konsep *national interest* oleh Charles Chong-Han Wu, guna memahami pertimbangan strategis Jepang di balik kebijakan restriksi ekspor tersebut.

1) Kepentingan Ekonomi

Perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan bukan hanya sekadar masalah sanksi atau pembatasan ekspor, tetapi lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk mendominasi industri strategis global. Menurut konsepsi kepentingan nasional dari Charles Chong-Han Wu, kepentingan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategisnya. Dalam konteks ini, Jepang memfokuskan upayanya untuk mempertahankan kendali atas sektor-sektor penting yang dapat menentukan masa depan ekonominya di era persaingan teknologi dan industri tinggi. Dalam konteks ini, perdagangan

internasional menjadi arena di mana Jepang dapat mempertahankan pengaruhnya dan mendorong negara-negara lain untuk mengakui pentingnya stabilitas dalam rantai pasokan global.

Perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan yang berlangsung antara 2019–2023 mencerminkan ketegangan yang mendalam bagi hubungan kedua negara tersebut, dengan adanya dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional. Jepang, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga posisisnya sebagai pemimpin teknologi dan industri. Dengan menerapkan pembatasan ekspor terhadap bahan baku semikonduktor yang penting bagi teknologi, Jepang berusaha untuk melindungi keunggulan kompetitifnya.

Kebijakan pembatasan ekspor bahan seperti *hydrogen fluoride* dan *photoresist* mencerminkan upaya Jepang menjaga daya saing ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi risiko keamanan nasional, khususnya terkait penggunaan teknologi dalam aplikasi militer. Sebagai negara yang bergantung pada perdagangan internasional, Jepang menghadapi tantangan dalam mengamankan pasar utama seperti AS, Tiongkok, dan Uni Eropa, sambil mengurangi ketergantungan melalui diversifikasi pasar ekspor dan impornya (Allen & Giovannetti, 2011). Langkah ini bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan memperluas akses pasar untuk memacu ekspor serta inovasi industri domestic (Wang, 2019).

Dengan akses yang lebih luas ke berbagai pasar, Jepang tidak hanya dapat mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar tertentu, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi tren baru dalam perdagangan, dan investasi internasional. Misal, selama periode ketegangan perdagangan, Jepang dapat dengan cepat menyesuaikan strategi produksinya untuk memenuhi permintaan dari pasar alternatif, sambil terus mempertahankan hubungan yang kuat dengan mitra-mitra strategis. Pendekatan ini menciptakan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Adapun kebijakan keterbukaan ekonomi Jepang, mencakup partisipasi aktif dalam *Free Trade Agreement* (FTA) dan kerjasama ekonomi regional, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dengan ekonomi terbuka, Jepang dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tren yang perdagangan dan investasi internasional (Zulkarnaen et al, 2012).

Dalam perang dagang, menjaga arus FDI yang stabil menjadi krusial, karena hal ini dapat membantu Jepang mengatasi tantangan dan memastikan stabilitas ekonominya di masa depan (Hindrayani, 2024). Dengan mengalihkan perhatian ke pasar baru dan membangun kemitraan strategis di kawasan Asia tenggara dan negara-negara lain, Jepang tidak hanya dapat melindungi investasinya tetapi juga menciptakan saluran alternatif untuk ekspor dan produksi yang lebih stabil, yang sangat penting di tengah ketidakpastian yang dihasilkan oleh perang dagang. Jepang memanfaatkan FDI sebagai alat untuk meningkatkan daya saing industri domestiknya. Dengan berinvestasi di luar negeri, terutama dalam sektor teknologi tinggi dan manufaktur, Jepang dapat mengakses sumber daya, teknologi, dan inovasi baru yang tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan Jepang, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selama periode ketegangan ini, Jepang berusaha untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dengan memperkuat rantai pasokan dan memanfaatkan potensi pasar baru. Melalui FDI, Jepang dapat membangun kapasitas yang lebih kuat dan ketahanan terhadap guncangan yang dihasilkan oleh ketegangan perdagangan, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra di wilayah yang lebih luas.

2) Kepentingan Keamanan

Dalam konteks perang dagang dengan Korea Selatan, kepentingan Jepang dalam aspek keamanan tidak dapat dipandang secara terpisah dari strategi keamanan nasionalnya. Menurut teori Charles Chong-Han Wu, keamanan ekonomi dan politik saling berkaitan erat, dan untuk Jepang, perang dagang ini

mencakup sejumlah sub-komponen strategis yang mempengaruhi stabilitas nasional. Tiga sub-komponen utama dalam kepentingan keamanan Jepang adalah aliansi, kapabilitas, dan nuklir.

Sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, Jepang memainkan peran penting menghadapi ancaman Korea Utara dan meningkatnya pengaruh Tiongkok. Melalui Perjanjian Keamanan AS-Jepang, Jepang mendapat perlindungan militer sekaligus dukungan strategis dalam ekonomi global (O'Shea & Maslow, 2024). Aliansi ini tidak hanya memberikan perlindungan militer, tetapi juga memperkuat posisi tawar Jepang, termasuk dalam menghadapi kebijakan proteksionis dan tantangan perdagangan internasional.

Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Jepang. Hubungan ekonomi ini semakin memperkuat posisi Jepang di pasar global, memberikan stabilitas dan dukungan yang sangat dibutuhkan selama ketegangan perdagangan. Dukungan AS diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan Jepang ini tidak menggangu stabilitas ekonomi regional maupun global, terutama dalam konteks rantai pasokan teknologi yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional. Jepang juga menginginkan AS tetap berperan sebagai penengah yang netral dan proaktif dalam meredakan konflik ekonomi ini, sekaligus memastikan bahwa dominasi teknologi di kawasan tetap sejalan dengan kepentingan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat.

Kemampuan pertahanan Jepang, khususnya dalam hal teknologi militer dan kapabilitas melindungi kepentingan ekonominya, juga merupakan komponen penting dalam menjaga posisinya di kancah perdagangan global. Secara konstitusional, militer Jepang diatur sebagai Pasukan Bela Diri (*Japan Self-Defense Forces*), kekuatan militer ini termasuk salah satu yang paling modern dan canggih. di dunia (Rusdiana et al., 2021). Jepang memiliki kemampuan militer yang mencakup teknologi mutakhir, mulai dari sistem pertahanan udara hingga kapal perang modern, serta sistem pertahanan siber yang penting dalam era digital saat ini. Kemampuan ini tidak hanya digunakan untuk menjaga pertahanan fisik, tetapi juga untuk melindungi infrastruktur

ekonomi penting, seperti jalur perdagangan maritim yang krusial bagi kegiatan impor dan ekspor Jepang (Pujol, 2024). Dalam konteks perang dagang ini, kapabilitas pertahanan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan dari gangguan menjadi sangatlah penting.

Jepang terus berupaya dalam memastikan bahwa kapasitas dalam industrinya tetap tidak tergantikan. Keputusan Jepang untuk membatasi ekspor bahan-bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan pada tahun 2019 adalah langkah yang dimaksudkan untuk memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan teknologi global dan melindungi kepentingan nasionalnya dari potensi kerentanan eksternal. Dalam konteks perang dagang ini, Jepang terus memastikan bahwa industri dalam negerinya tetap mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada pihak luar, baik pada bahan baku maupun dalam teknologi. Menjaga kapabilitas nasionalnya, juga berkaitan dengan upaya Jepang dalam mempertahankan ketahanan ekonomi nasional dan daya saing internasional, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan dalam industri teknologi tinggi.

Dalam hal kepemilikan nuklir, meskipun Jepang tidak memiliki senjata nuklir sendiri, negara ini dilindungi oleh payung nuklir Amerika Serikat, yang menyediakan jaminan keamanan terhadap potensi ancaman nuklir dari negara-negara lain, terutama Korea Utara. Payung nuklir ini memberikan Jepang lapisan perlindungan tambahan yang memastikan stabilitas keamanan nasionalnya (Rudiany et al, 2020). Selain itu, Jepang aktif dalam perjanjian non-proliferasi nuklir, yang membantu menciptakan stabilitas global. Stabilitas ini penting untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Jepang juga memiliki kepentingan dalam energi nuklir untuk keperluan domestic (Matamis, 2024). Energi nuklir memainkan peran penting dalam ketahanan energi Jepang, yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi internal negara tersebut. Dalam perang dagang ini, stabilitas pasokan energi, termasuk energi nuklir, menjadi faktor penting dalam mempertahankan ekonomi yang kuat dan tangguh terhadap guncangan eksternal.

Jepang memiliki program energi nuklir yang sangat maju, yang penitng untuk menjaga ketahanan energi nasionalnya. Ketergantungan Jepang pada energi nuklir meningkat setelah krisis energi global dan berkurangnya pasokkan bahan bakar fosil. Di tengah perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, Jepang ingin memastikan bahwa rantai pasokan untuk material nuklir dan teknologi yang mendukung industri energinya tetap aman dan stabil, serta tidak terganggu oleh dinamika geopolitik. Jepang juga memiliki kepentingan untuk memastikkan bahwa industri nuklir sipilnya terus berkembang melalui kolaborasi internasional, termasuk dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, meskipun menghadapi tantangan dari Korea Selatan yang juga memiliki industri nuklir yang berkembang pesat.

Selain kepentingan diatas, Jepang juga memiliki kepentingan strategis dalam sub-komponen nuklir ini, kekhawatiran Jepang dalam nuklir ini adalah potensi bahwa bahan baku semikonduktor yang diekspor oleh Korea Selatan ke negara-negara lain akan disalahgunakan sebagai bahan baku mengembangkan teknologi senjata nuklir. Jepang melihat ancaman tersebut sebagai satu hal yang serius terhadap stabilitas keamanan global. Jepang memandang jika proliferasi teknologi nuklir yang tidak terkendali dapat mempercepat terjadinya perlombaan senjata nuklir diberbagai kawasan. Terkait hal ini, Jepang merasa perlu untuk menyoroti isu tersebut dan mendorong pengawasan lebih ketat guna memastikan bahwa bahan baku yang bersifat kritis tersebut tidak akan disalahgunakan, mengingat bahwa implikasi serius yang dapat timbul dari adanya penyebaran teknologi nuklir yang tidak terkontrol.

Secara keseluruhan, Jepang berupaya mempertahankan keunggulan teknologinya di sektor energi nuklir dan melindungi industrinya dari dampak geopolitik, sambil menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur yang sensitif terhadap isu nuklir. Langkah-langkah ini mencerminkan strategi terpadu Jepang untuk memperkuat kapabilitas nasionalnya dalam menghadapi ketegangan perdagangan dan geopolitik.

3) Kepentingan Komunitas

Dalam konteks perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan, peran aspek komunitas tidak kalah penting dibandingkan dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan keamanan. Jepang memanfaatkan keterlibatannya dalam komunitas internasional melalui kerja sama dengan organisasi antar pemerintah (IGO), bantuan pembangunan (ODA), serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tiga subkomponen ini memainkan peran krusial dalam memperkuat posisi Jepang di panggung global dan mendukung kepentingan ekonominya.

Jepang terlibat aktif dalam berbagai organisasi antar pemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Partisipasi Jepang dalam organisasi-organisasi ini memberinya *platform* untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan global dan memperkuat perdagangan bebas (Idris, 2023). Sebagai pendukung terdepan rezim perdagangan bebas, Jepang menggunakan WTO untuk mempromosikan aturan- aturan yang mendorong perdagangan yang adil dan transparan serta melawan praktik perdagangan yang tidak adil. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, Jepang dapat menyelesaikan konflik perdagangan dengan negara lain secara damai dan legal, yang membantu menjaga stabilitas ekonomi global serta melindungi kepentingan Jepang dari ketidakpastian perang dagang ini. Di sisi lain, sebagai anggota G20, Jepang juga berusaha untuk memastikan bahwa perang dagang yang terjadi ini tidak merusak tatanan ekonomi global yang lebih luas. Dalam berbagai pertemuan G20, Jepang menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan perlunya kolaborasi multilateral. Jepang juga berupaya dalam memanfaatkan pengaruh di G20 untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap rantai pasokan global yang stabil dan inovasi teknologi yang aman.

Di luar forum-forum ekonomi, Jepang juga melibatkan organisasi antar pemerintah, seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), untuk menegakkan standar dan regulasi yang mendukung kebijakan industrinya. Dalam perang dagang antara Jepang dan Korea selatan, Jepang

memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan norma-norma yang diakui secara internasional, seperti standar keselamatan dalam produksi bahan kimia dan teknologi tinggi. OECD, sebagai organisasi yang mempromosikan kebijakan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, menjadi forum di mana Jepang dapat menunjukkan bahwa kebijakan ekspornya bukanlah bentuk proteksionisme semata, melainkan atas dasar pada pertimbangan keselamatan dan stabilitas rantai pasokan. Dalam APEC, Jepang berperan aktif untuk mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan salah satu pasar ekspor terpenting bagi Jepang. Partisipasi ini memberikan kesempatan Jepang untuk memperkuat kerja sama regional, menjaga stabilitas perdagangan, serta mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang sedang terlibat perang dagang. Dengan berpatisipasi aktif dalam berbagai organisasi antar pemerintah ini, Jepang memperkuat posisi dalam diplomatifknya dan menunjukkan kepada dunia bahwa berbagai langkah yang diambil dalam perang dagang tersebut memiliki dasar hukum dan normatif yang kuat, sekaligus mengurangi risiko isolasi diplomatik di tengah konflik dengan Korea Selatan.

Dalam periode perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, Jepang memiliki kepentingan besar lainnya untuk menjaga momentum pembangunan nasionalnya, terutama dalam bidang teknologi tinggi, infrastuktur industri, dan inovasi. Jepang sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, telah lama berfokus pada pembangunan yang berbasis pada teknologi dan industri manufaktur canggih. Perang dagang dengan Korea selatan terutama dalam restriksi ekspor bahan baku semikonduktornya, merupakan langkah yang dilihat oleh Jepang sebagai cara untuk melindungi sektor industri yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengendalikan aliran material yang diperlukan oleh Korea Selatan untuk memproduksi semikonduktor dan layar OLED, Jepang berupaya menjaga keunggulannya di sektor ini sambil memastikan bahwa pembangunan teknologi dalam negerinya tidak terganggu oleh pesaing-pesaing asing lainnya.

Selain mempertahankan dominasi teknologi, Jepang juga memiliki kepentingan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kapabilitas industri domestiknya guna mendukung daya saing global. Jepang sebagai salah satu negara yang mendonorkan program bantuan pembangunan internasional dengan jumlah yang besar, dan berperan aktif dalam mendukung berbagai pembangunan di kawasan Asia, dengan melalui investasi dalam infrastruktur untuk negara-negara berkembang. Jepang juga berusaha untuk menjaga citra positifnya sebagai pemimpin pembangunan di kawasan ini, yang dapat menjadi alat diplomasinya untuk menarik berbagai dukungan dari negara-negara sekitar dan memperkuat posisinya dalam arena global.

Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang besar di kawasan Asia Timur, Jepang ingin memastikan bahwa perang dagang yang terjadi antara ia dengan Korea Selatan ini tidak memperlemah posisinya sebagai salah satu pilar demokrasi di dalam kawasan. Pada ketegangan yang meningkat, Jepang berusaha untuk memperlihatkan bahwa keputusan kebijakan, termasuk dalam restriksi ekspor bahan baku semikonduktor, diambil atas dasar proses demokratis dan transparan yang menghormati aturan hukum dan standar internasional. Kepentingan ini menjadi penting, karena Jepang ingin mempertahankan dukungan dari sekutu-sekutu demokratis lainnya, termasuk Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa, yang juga memiliki hubungan erat dengan negara Korea Selatan. Jepang ingin menunjukkan kepada global bahwa perang dagang ini bukan didasarkan pada tindakan sepihak atau otoriter, namun merupakan bagian dari kebijakan yang didukung oleh prosedur hukum yang jelas dan sistem pemerintahan yang menghormati hak-hak semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Jepang berharap dapat menjaga kepercayaan dari komunitas internasional, terkhusus negara-negara demokrasi yang lain, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Jepang bukan sekadar untuk kepentingan nasional, namun, juga demi menjaga tatanan global yang berbasis terhadap aturan dan nilai demokrasi. Jepang melihat bahwa dalam perang dagang ini, posisi moral sebagai negara

demokrasi dapat menjadi kekuatan yang penting dalam menyeimbangkan posisi geopolitiknya.

KESIMPULAN

Pada 2019, hubungan Jepang dan Korea Selatan memanas setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan Jepang seperti Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy untuk memberi kompensasi kepada korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Jepang menolak, mengacu pada penyelesaian yang telah dicapai melalui Perjanjian 1965. Sebagai tanggapan, Jepang memberlakukan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan, yang memicu perang dagang antara kedua negara. Perang dagang ini memicu reaksi keras dari masyarakat Korea Selatan, yang memboikot produk Jepang seperti otomotif dan barang konsumsi. Akibatnya, ekspor Jepang ke Korea Selatan turun hingga JYP 46,6 miliar dalam satu tahun, berdampak negatif pada PDB Jepang. Meski mengalami kerugian, Jepang tetap mempertahankan kebijakan pembatasan tersebut.

Berdasarkan model *national interest* oleh Han-Wu, penelitian ini menemukan adanya tiga kepentingan utama yang mendasari keputusan Jepang untuk terlibat dalam perang dagang dengan Korea Selatan. Dalam aspek *economic*, perdagangan, keterbukaan, dan investasi asing langsung adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jepang di tengah persaingan global yang ketat. Dalam aspek *security*, aliansi dan kemampuan pertahanan memberikan stabilitas yang diperlukan untuk mendukung kebijakan ekonomi. Terakhir, dalam aspek *community*, keterlibatan dalam organisasi internasional dan nilai-nilai demokrasi membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan stabil. Perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan (2019– 2023) menunjukkan bagaimana ketiga aspek ekonomi, keamanan, dan komunitas, saling terkait dan berkontribusi pada strategi global Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, Franklin, and Giorgia Giovannetti. “The Effects of the Financial Crisis on Sub-Saharan Africa.” Review of Development Finance 1, no. 1 (January 2011): 1–27. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2010.10.002. Diakses pada 6 Januari 2023.

Anggraeni, N. Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. Al Ahkam. (2019). 15(1), 1–7. https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1967.

Asih, Kiki Nindya, dan Masagung Suksmonohadi. “Ketegangan Jepang-Kore Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian.” Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional-Edisi III, 2019.

CFI Team, “Trade Wars: Economics Conflict between Countries Through Trade Barriers,” 2023. Diakses melalui https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/trade-wars/. Diakses pada 14 Juni 2023.

Dong-Hyun, Lee dan Park Sung-Woo, “’No Japan’ Movement still Affecting Sales Today” koreajoongangdaily.joins.com, (2019).

Hindrayani, Aniek. “Investasi Langsung Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi.” JUPE 1, no. 1 (2024): 51 - 68.

Idris, Muhammad. “Upaya Kerjasama Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Mengatasi Kartel Narkoba Di Meksiko Sebagai Transnational Organized Crime.” Kata Kunci-Amerika Serikat, Kartel Narkoba 7, no. 2 (2023). https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.

Ivan Gonzalez Pujol. “Theorising the Hedging Strategy: National Interests, Objectives, and Mixed Foreign Policy Instruments.” All-Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace/All-Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, March 5, 2024, 1–22. https://doi.org/10.20991/allazimuth.1480020.

Leba, Elsa Emiria. 2019. "Korsel Mulai Balas Dendam ke Jepang." Kompas.Id, August 12, 2019. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/korsel-mulai-balas-dendam-ke-jepang.

Mangkuto, Wangi Sinintya, "Kronologi Perang dagang Jepang Korea, Dari Luka Dunia," (2019). https://www.cnbcindonesia.com/news/20190829133707-4-95656/kronologi-perang-dagang-Jepang-korea-dari-luka-perang-dunia. Diakses 13 Maret 2023.

Matamis, Joaquin. "Japan's Strategic Future and Implications for the US-Japan Alliance • Stimson Center." Stimson Center, February 28, 2024. https://www.stimson.org/2024/japans-strategic-future-and-implications-for-the-us-japan-alliance/. Diakses pada 26 Juni 2024.

Nurbaiti, Lukluk, "Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan," JOM FISIP 8, Edisi 1. 2021.

O'Shea, Paul, and Sebastian Maslow. "Rethinking Change in Japan's Security Policy: Punctuated Equilibrium Theory and Japan's Response to the Russian Invasion of Ukraine." Policy Studies 45 (January 31, 2024): 1–24. https://doi.org/10.1080/01442872.2024.2309218.

Rudiany, Novita Putri, Novita Putri Rudian, IGB Dharma Agastia, Rifki Dermawan, Masitoh Nur Rohma, Frisca Alexandra, Fadhila Inas Pratiwi, Ariski Aznor, and SD Hardi Alunaza. "Pentingnya Diplomasi Energi Dalam Upaya Mencapai Ketahanan Energi Nasional." JSTOR, 2020. https://www.jstor.org/stable/resrep25407.4.

Rusdiana, Dede, Amarulla Octavian, Yusuf Ali, Suryono Thamrin, and Aris Lekha Sarjito. "Belajar Dari Kemenangan Jepang Pada Perang Tsushima: Pembangunan Kekuatan Militer Melalui Industri Strategis." Jurnal Sejarah Citra 6, no. 1 (27 August https://doi.org/10.14710/jscl.v6i1.37678.

Sebayang, Rehia, "Kalap! Toko Korsel Pasang Poster Boikot Jepang, Uniqlo Rugi," CNBC Indonesia, (2019).

Sintionean, Condruta, "The Role of Historical Memory in Japan-South Korea Relations" European Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 12, Issue 1. 2020. DOI: http://doi.org/10.24818/ejis.2020.04.

Wang, Yiquan. "Trade Disagreement between Japan and South Korea." Asian Business Research 4, no. 3, https://doi.org/10.20849/abr.v4i3.685.

Wu, Charles Chong-Han. "Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling." The 116 Korean Journal of International Studies 15, no. 3 (December 31, 2017): 391–419. https://doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.391.

Zulkarnaen, Ichsan, Rina Oktaviani, Mangara Tambunan, and Yulius. "Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan Kawasan Ekonomi Asia Terhadap Kinerja Ekonomi Makro ASEAN." Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan 1, no. 2 (December 2012): p 104 – 119.

The Straits Times, "Boycott Japan: South Korean Instagrammers react to export curbs." Diakses 2023. https://www.straitstimes.com/asia/eastasia/boycott-japan-south-korean- instagrammers-react-to-export-curbs.

Yanti, Yunisa, "Seberapa Penting Sistem Ekonomi Diterapkan di Suatu Negara." 2018. Diakses melalui https://www.kompasiana.com/yunisa50946/5b161844cf01b4656e5c9f72/seberapa-penting-sistem-ekonomi-di-terapakan-di-suatu-negara.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan-ROK EPA (overview)," mofa.go.jp, diakses melalui https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/rok/overview.html. Diakses pada 14 Februari 2024.